

MEMBANGUN BENTENG PEREKONOMIAN YANG TAHAN TERHADAP KRISIS

Oleh: Eri Hariyanto, Widyaiswara Ahli Madya, Pusdiklat Keuangan Umum BPPK,
Kementerian Keuangan

1. Tantangan Era Globalisasi

Era globalisasi telah membuat dunia menjadi satu kesatuan wilayah, tanpa ada batas teritori serta terjadinya penyebaran informasi yang sangat cepat tanpa jeda waktu. Dengan adanya kondisi ini menyebabkan gejolak dari suatu wilayah akan sangat mudah tertransmisi ke wilayah lain dalam waktu singkat. Gejolak yang datang dengan tiba-tiba dapat menjadi gangguan terhadap kondisi perekonomian yang harus dihadapi setiap waktu. Dalam era globalisasi ini, memberikan reaksi terhadap adanya gejolak perekonomian boleh dikatakan sebagai suatu tindakan yang terlambat. Mencegah atau membuat perlindungan terhadap adanya suatu gangguan yang akan membuat perekonomian keluar dari jalur merupakan hal yang lebih baik dilakukan dan berbiaya lebih murah. Dengan begitu, seluruh pelaku ekonomi dituntut untuk bersinergi dan mewaspadaikan semua gejala yang mungkin dapat mengganggu stabilitas perekonomian.

Boediono (2016: 285-286) menyebutkan bahwa di era globalisasi ini ada tiga macam gangguan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian, yaitu:

1) Gangguan yang berasal dari gejolak harga-harga komoditi utama ekspor dan impor.

Mengambil pelajaran dari era tahun 1980-an dimana Indonesia saat itu sebagai pengekspor utama minyak mentah merasakan pukulan yang sangat berat atas kejatuhan harga minyak mentah saat itu. Hal ini berdampak serius terhadap pendapatan APBN dan neraca perdagangan. Kemudian hal sebaliknya terjadi pada era tahun 2000-an, dimana harga minyak bumi saat itu melambung tinggi. Namun sayangnya pada waktu itu posisi Indonesia bukan lagi sebagai pengekspor, tetapi saat itu sudah menjadi pengimpor minyak bumi. Hal ini tentu sangat memberatkan APBN, terutama subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin besar. Beberapa tahun terakhir ini Indonesia menghadapi pelemahan harga komoditi yang berkepanjangan, padahal kita ketahui sampai saat ini Indonesia masih menjadi pengekspor komoditi yang bersumber dari hasil alam seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Kelompok gangguan ini disebut sebagai gejolak *terms of trade*, dengan berbagai konsekuensinya pada sektor *riil* dan sektor keuangan di dalam negeri.

2) Gangguan yang berasal dari gejolak pasar modal.

Di era globalisasi, arus uang global yang jumlahnya triliunan dollar dapat berbalik arah dengan cepat dan imbasnya juga dengan cepat dirasakan di dalam negeri berupa gejolak pada kurs, kekeringan likuiditas perbankan, dan defisit neraca modal atau *capital account*. Pada putaran berikutnya, dampak sektor keuangan ini kemudian merembet ke sektor *riil*

berupa PHK, penutupan perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi yang merosot. Kejadian ini pernah dirasakan Indonesia pada saat krisis keuangan era 1997/98, krisis yang meninggalkan luka yang mendalam terhadap perekonomian bangsa. Kemudian Indonesia mengalaminya lagi ketika terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008/2009, tetapi kali ini dengan kerusakan yang lebih ringan berkat kesiapan Indonesia yang lebih baik.

3) Gangguan ketiga adalah gangguan yang terkait dengan kondisi alam.

Bencana alam seperti gelombang angin El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan pada tahun 1997/1998 dan pada tahun 2015/2016, tsunami pada tahun 2004, dan bencana-bencana alam lain.

Selanjutnya, menurut Boediono (*ibid*, hlm 286) dari ketiga gangguan tersebut, menurut pengalaman yang beliau alami baik selaku akademisi maupun pengalaman nyata sebagai nahkoda perekonomian bangsa, pembalikan arus dana mempunyai dampak yang paling eksplosif di sektor keuangan, sedangkan perubahan harga ekspor dan impor kurang eksplosif, tetapi langsung masuk ke sektor *riil* dan dapat berlangsung lebih lama. Sementara itu, gangguan alam biasanya tidak memicu krisis, tetapi dapat memperburuk keadaan. Jadwal kedatangan dari masing-masing gangguan sulit diterka. Tetapi tentunya dampaknya akan terasa lebih berat apabila lebih dari satu macam gangguan terjadi bersamaan.

Adanya globalisasi sebenarnya dapat memberikan banyak keuntungan. Globalisasi sebenarnya sebuah kesempatan untuk memperluas jangkauan perekonomian sehingga semakin banyak manfaat yang diperoleh. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh diantaranya adalah semakin meningkatnya kemakmuran masyarakat karena masyarakat dapat memilih barang yang lebih baik dengan harga yang lebih murah, memperluas pasar dari produk dalam negeri disebabkan kebebasan setiap negara untuk memasarkan produknya, mempermudah untuk memperoleh transfer teknologi dan modal karena adanya investasi asing yang masuk, mempermudah pemerintah untuk memperoleh pinjaman dana murah untuk pembangunan. Namun semua hal tersebut dapat diraih apabila Indonesia memiliki daya saing yang baik sehingga dapat berkompetisi di pasar internasional. Selain itu, yang lebih penting adalah menyiapkan perangkat pertahanan diri terhadap segala kemungkinan buruk dari globalisasi yang selalu diliputi oleh suasana ketidakpastian.

2. Membangun Benteng Perekonomian

Belajar dari krisis ke krisis, Pemerintah Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam menyiapkan pertahanan diri untuk menghadapi situasi yang kurang *favorable* di masa depan. Bentuk dari pertahanan tersebut berupa sistem dan struktur ekonomi yang dirancang agar tahan terhadap goncangan krisis. Sistem yang dibangun merupakan sinergi dari seluruh pemangku kebijakan ekonomi di Indonesia, baik dari kebijakan fiskal, moneter, pengelolaan perbankan dan industri keuangan, lembaga penjamin simpanan, dan para *stakeholders* perekonomian lainnya. Para pemangku kebijakan tersebut memiliki kekuatan untuk membangun struktur perekonomian bangsa agar lebih tahan terhadap gangguan stabilitas ekonomi.

Beberapa ciri struktur ekonomi yang perlu dibangun agar lebih tahan terhadap guncangan ekonomi diantaranya:

- 1) Mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas-komoditas yang sangat strategis, misalnya komoditas pangan (beras, gandum, jagung, gula, dll) dan komoditas energi (minyak dan gas). Kedua komoditas tersebut adalah komoditas primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Agar terhindar dari ketergantungan impor, maka sekuat tenaga kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan untuk menyediakan komoditas tersebut dari dalam negeri. Apabila negara tidak mampu menyediakan dan bergantung pada impor, maka terancam mengalami gangguan apabila *supply* barang-barang tersebut berkurang dan harga-harganya melambung atau disebut gejala *term of trade*. Pada masa mendatang ketahanan pangan dan energi akan menjadi kekuatan ekonomi politik yang sangat penting. Kemandirian dalam penyediaan pangan dan energi akan menjadi penopang stabilitas perekonomian.
- 2) Mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditi atau bahan mentah. Saat ini Indonesia dikenal sebagai pengekspor bahan mentah seperti sawit, kopi, kakao, karet, hasil hutan, produk perikanan seperti udang, dan bahan tambang seperti batu bara dan gas alam. Komoditi tersebut biasanya akan digunakan sebagai bahan baku industri di negara-negara tujuan ekspor. Ketika negara-negara industri seperti China, Amerika dan Jepang mengalami penurunan kinerja ekonomi, maka ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan utama ekspor ikut mengalami penurunan. Hal ini akan berdampak terhadap posisi neraca perdagangan dan penerimaan negara dari transaksi ekspor. Defisit neraca perdagangan dapat membahayakan stabilitas ekonomi, yang disebabkan oleh berkurangnya penerimaan defisit dari ekspor. Apabila kebutuhan mata uang asing terutama USD meningkat untuk kebutuhan ekspor, maka defisit neraca perdagangan dapat menekan nilai tukar rupiah terhadap USD dan yang perlu diwaspadai adalah dampak selanjutnya seperti inflasi. Sebagai jalan keluar, Pemerintah nampaknya perlu menggeser pola ekspor dari bahan mentah dan mendorong masyarakat menciptakan bahan-bahan olahan untuk diekspor sehingga lebih bersaing di pasar internasional.
- 3) Menjaga agar perkembangan sektor keuangan beriringan dengan berkembangnya sektor riil. Kondisi ini tercipta apabila sinergi pemangku kebijakan fiskal dan pemangku kebijakan moneter dilakukan lebih erat lagi. Kementerian Keuangan selaku pemangku kebijakan fiskal adalah otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mendorong sektor riil tumbuh lebih baik melalui berbagai kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam APBN. Melalui kebijakan belanja pemerintah (*government spending*) akan menjadi stimulus masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh Pemerintah. Aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong ekonomi tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pertumbuhan ekonomi tersebut terjaga dengan baik, otoritas moneter yaitu Bank Indonesia mengimbangnya dengan menjaga agar inflasi berada dalam tingkat yang menguntungkan. Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam menjaga tingkat inflasi (*inflation targeting*) melalui berbagai instrumen yang dimilikinya,

misalnya dengan menjaga jumlah uang beredar, menjaga jumlah cadangan minimum perbankan (giro wajib minimum), dll. Bauran dari kedua kebijakan tersebut akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

4) Melakukan pendalaman pasar keuangan (*financial market deepening*). Pasar keuangan mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar keuangan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan modal untuk diinvestasikan secara efisien, menyediakan instrumen untuk meningkatkan nilai aset dari para investor, dan meningkatkan stabilitas ekonomi secara umum dengan adanya diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Disamping perannya yang sangat strategis, pasar keuangan perlu diatur secara baik karena seperti kita ketahui pasar keuangan terhubung secara global dengan pasar keuangan internasional yang rawan terhadap guncangan. Pasar keuangan yang dalam dapat didefinisikan sebagai kondisi pasar keuangan yang terus meningkat efisiensinya, penyediaan pembiayaannya, omset pasarnya, semakin luas pangsa pasar dan jenis instrumennya, serta kemudahan dalam memberikan layanan.

Mandiri Institute dan Oliver Wyman (2015: 6) menyebutkan ciri-ciri dari pasar keuangan yang dalam diantaranya adalah:

- a. Pilihan instrumen pembiayaan yang sangat banyak untuk para pihak yang memerlukan pembiayaan baik korporasi maupun institusi keuangan.
- b. Menyediakan pilihan instrumen investasi yang sangat banyak untuk para investor, baik dari sisi tenor maupun profil keuangannya dan risiko.
- c. Infrastruktur pasar yang berkualitas, yang dapat menyediakan kemudahan informasi yang tepat waktu kepada para pelaku pasar.
- d. Ketersediaan instrumen untuk mendiversifikasi investasi dan pengelolaan risiko.

Di satu sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Namun di sisi lain, pasar keuangan Indonesia masih sangat dangkal. Beberapa indikator bahwa pasar keuangan masih dangkal adalah penggunaan jasa keuangan yang masih rendah. Hal ini diketahui dari rasio kredit, rasio dana pihak ketiga, dan rasio jumlah uang beredar terhadap PDB yang masih rendah. Pasar keuangan yang dangkal akan menyebabkan perekonomian tidak stabil dan mudah terkena guncangan. Apalagi mayoritas pelaku pasar keuangan domestik adalah pemodal asing yang mudah memindahkan modal sesuai dengan preferensinya.

Untuk mencegah terjadinya krisis, perlu adanya tindakan preventif. Tindakan preventif tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang harus terus dimonitor. Boediono (*ibid* hlm 290), menyebutkan beberapa indikator yang harus diwaspadai yaitu:

- Defisit (primer dan total) APBN
- Sumber pembiayaan defisit (terutama yang rentan perubahan arus modal luar)
- Rasio utang (dalam dan luar negeri) pemerintah terhadap PDB
- Profil jatuh waktu utang Pemerintah

- Pos-pos utama penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dipengaruhi *terms of trade*
- Utang (dalam dan luar negeri) BUMN dan swasta
- Harga properti, saham, surat utang pemerintah (dan kalau ada obligasi BUMN dan swasta) di pasar sekunder, emas, dan sebagainya
- Laju pertumbuhan kredit perbankan

Menjaga indikator-indikator tersebut dalam batas *manageable* merupakan salah satu pertahanan ekonomi yang dapat mengurangi guncangan dari eksternal. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah prosedur standar yang diterapkan apabila sewaktu-waktu terjadi krisis yang sesungguhnya.